

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, PDRB, EKONOMI, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2005-2009

Ery Shiska
Universitas Bangka Belitung

Abu Nizaruddin
Universitas Bangka Belitung

ABSTRACT

Local Tax Revenue is fund allocation income not only to fulfill the local expenditure and people's needs economically, but also to prosper them. The costs of local needs cannot be achieved and the society has no profit from the region without it.

This study aims to assess the influence of population growth, Gross Regional Domestic Product, economy, and inflation rate to the local tax revenues in Pangkalpinang. It uses local tax revenue from 2005 to 2009 as the population. Samples are carried out by non-probability sampling method, for instance, purposive sampling with particular consideration. The data is from DPPKAD and BPS Pangkalpinang, and analyzed by multiple regression with SPSS 17.

The result shows that population growth, Gross Regional Domestic Product, economy, and inflation rate (independent variables) have no significant influence simultaneously to the local tax revenue (dependent variable). While, those independent variable impacts significantly in partial to the dependent variable.

Keywords: Local Tax Revenue, Population Growth, Gross Regional Domestic Product, Economy, and inflation Rate.

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah merupakan indikator dan mobilitas yang ditunjukkan dari proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah berbeda dengan pendapatan asli daerah lainnya dikarenakan potensi yang mengalami perkembangan ataupun penurunan yang berasal dari berbagai sektor.

Mengingat hal tersebut, maka daerah harus melakukan upaya-upaya positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD secara positif dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki daerah harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru tanpa membebani masyarakat dan tanpa menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Upaya peningkatan PAD tersebut harus dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk pengalokasian anggaran dalam APBD.

Terjadinya suatu realisasi pendapatan dan tercapainya target pajak daerah disebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, karena kebanyakan masyarakat Indonesia kurang memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak daerah tersebut. Padahal beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang. Provinsi kepulauan Bangka Belitung yang memiliki dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Belitung. Bangka Belitung ditetapkan sebagai Provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang awalnya merupakan bagian Provinsi Sumatera Selatan. Dengan semakin majunya Kota Pangkalpinang maka pertumbuhan jumlah penduduk juga menunjukkan peningkatan. Baik dari angka kelahiran ataupun dari penduduk yang datang ke Kota Pangkalpinang untuk mencari pekerjaan, jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2009 berdasarkan data BPS Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 160.451 jiwa. Angka tersebut diperoleh dari angka proyeksi hasil survey (SUPAS-Survei Pertengahan antar Sensus) terhadap data SP (Sensus Penduduk) sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang dari tahun 2000 ke tahun 2009 adalah sebesar 2,47 persen, cukup tinggi untuk wilayah urban. Dengan berkembangnya Kota Pangkalpinang, penerimaan pada Pajak Daerah juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya perekonomian di Kota Pangkalpinang.

Seiring dengan peningkatan standar hidup masyarakat maka golongan berpenghasilan tinggi akan semakin meningkat sehingga hal ini akan menyebabkan peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Peningkatan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mempunyai hubungan dengan peningkatan penerimaan pajak daerah karena sektor-sektor pajak daerah juga ada dalam PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka juga akan meningkatkan penerimaan pajak pada sektor-sektor tersebut. PDRB Kota Pangkalpinang atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 berjumlah Rp 2,625 triliun atau meningkat sebesar 6,72 persen terhadap PDRB tahun 2008 yang sebesar Rp 2,459 triliun. Jika dilihat dari lapangan usahanya, maka penyumbang PDRB terbesar pada tahun 2009 ini adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yakni sebesar 40 persen, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 21,9 persen, dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 9 persen. Selanjutnya pertumbuhan Ekonomi yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Bila dilihat pola pertumbuhan ekonomi selama 4 tahun terakhir memperlihatkan pola perkembangan yang terus bergerak positif kecuali pada 2007 dan 2009. Dari tahun 2005 pergerakan pertumbuhan ekonomi terus meningkatkan 5,08 persen dan terus naik menjadi 5,09 persen di 2006, namun bergerak turun menjadi 4,97 persen di 2007 dan 4,01 persen pada 2009.

Yang terakhir tingkat Inflasi yang merupakan rata-rata kenaikan harga barang dan jasa secara umum terus menerus dalam persen. Dengan meningkatnya inflasi maka akan menaikkan tarif pajak pada barang atau jasa yang bersangkutan. Pada tahun 2009 terjadi penurunan inflasi sektoral yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,61 persen setelah stabil selama 2 tahun sejak kenaikan inflasi sektoral yang terjadi pada tahun 2005 yang disebabkan kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi. Penurunan pada tahun 2009 ini disebabkan terjadi akibat penurunan pada semua sektor dan dampak dari krisis global. Berbeda dengan tahun 2008, besarnya inflasi mencapai 10,65 persen yang diakibatkan oleh kenaikan harga-harga sektor pada sektor bangunan yaitu harga material khususnya semen dan besi yang mencapai dua kali lipat harga biasanya. maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan memilih judul "

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kota Pangkalpinang)

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestasi ada atau tidaknya pengaruh pertumbuhan Penduduk, pengaruh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah pada Kota Pangkalpinang periode 2005-2009 kemudian menginvestasi ada tidaknya pengaruh pertumbuhan penduduk, PDRB, Ekonomi dan tingkat inflasi secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah.

Manfaat Penelitian

Segala sesuatu yang telah diteliti memiliki manfaat untuk meningkatkan mobilitas bagi bidang tertentu untuk mendalami suatu wawasan tentang perpajakan terutama mengenai pajak daerah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian sebagai bahan rekomendasi dalam hal menentukan target Pajak Daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), penjabarannya yaitu:

1. Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah pada objek yang sesungguhnya, menambah pengetahuan tentang pajak daerah dan pendapatannya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bacaan dan pengetahuan serta masukan bagi pihak-pihak yang berminat terhadap topik pajak daerah. Kemudian dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait mengenai potensi, prediksi kemudian perkembangan pajak daerah.

Pengertian Pajak

Menurut Soemahamidjaja, dikutip oleh Pudyatmoko (2002:2) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2008:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Penerimaan Pajak Daerah adalah Pemasukan dana Alokasi yang didapat dari Pajak daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan Ekonomi masyarakat dan untuk kebutuhan belanja daerah sekaligus mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Sebagai pedoman, perluasan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ini sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini (Bird dan Vailancourt, 2000:234):

1. Basis pajak hendaknya merupakan benda atau sumber penghasilan yang relatif tidak bisa berpindah. Hal ini diperlukan untuk memungkinkan pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian tarif tanpa harus mengorbankan basis pajak tersebut.

2. Penerimaan pajak daerah harus dapat menutupi kebutuhan daerah dan bersifat dinamis, sehingga dapat dikembangkan paling tidak sama cepatnya dengan kebutuhan peningkatan.
3. Penerimaan pajak daerah harus relatif stabil dan relatif dapat diproyeksikan dengan baik.
4. Beban pajak harus diupayakan tidak dapat dialihkan ke daerah lain.
5. Untuk keperluan akuntabilitas, obyek pajak hendaknya dapat dilihat oleh publik.
6. Pengenaan pajak daerah harus cukup memenuhi aspek keadilan (*equitas*) oleh wajib pajak.
7. Pajak daerah harus cukup mudah dikelola dengan efektif dan efisien.

Pertumbuhan Penduduk

Kota Pangkalpinang berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2009 sebanyak 160.451 jiwa, laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang dari tahun 2000 ke Tahun 2000 adalah sebesar 2,47 persen cukup tinggi untuk wilayah urban/perkotaan. Dengan laju pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai perluasan wilayah yaitu seluas 118,4 km² maka kepadatan penduduk di Kota Pangkalpinang berada pada peringkat tertinggi dibandingkan daerah-daerah otonomi lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dilihat dari kepadatan penduduk menurut kecamatan maka kecamatan Taman sari merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi sedangkan gerunggang yang terjarang penduduknya. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan sex ratio sebesar 107, artinya diantara 100 penduduk perempuan Kota Pangkalpinang terdapat 107 penduduk laki-laki. Sex Rati ini bervariasi pada seluruh kecamatan, seperti gerunggang sebesar 102, Pangkalbalam 108, Bukit Intan 105, Taman sari 102 dan yang tertinggi kecamatan Rangkui mencapai 114 yang menandakan bahwa pada kecamatan ini jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Bila dilihat pola pertumbuhan ekonomi selama 4 tahun terakhir memperlihatkan pola perkembangan yang terus bergerak positif kecuali pada tahun 2007 dan 2009. Dari tahun 2005 pergerakan pertumbuhan ekonomi terus meningkat menjadi 5,08 persen dan terus naik menjadi 5,09 persen pada tahun 2006, namun bergerak turun menjadi 4,97 persen di tahun 2007 dan 4,01 persen pada tahun 2009. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,01 persen. Sektor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang paling besar adalah sektor jasa-jasa sebesar 8,83 persen, serta sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 4,42 persen.

Laju Inflasi

Laju inflasi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang pada tahun 2009 terjadi penurunan inflasi sektoral yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,61 persen setelah stabil selama 2 tahun sejak kenaikan Inflasi sektoral yang terjadi pada tahun 2005 yang disebabkan kenaikan BBM dan pengurangan subsidi. Penurunan pada tahun 2009 ini disebabkan terjadi akibat penurunan pada semua sektor dan dampak dari krisis global. Berbeda dengan tahun 2008 besarnya inflasi mencapai 10,65 persen yang diakibatkan oleh kenaikan harga-harga sektor pada sektor bangunan yaitu material khususnya semen dan besi yang mencapai dua kali lipat harga biasanya.

Perkembangan PDRB

PDRB Kota Pangkalpinang atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 berjumlah Rp 2,625 triliun atau meningkat sebesar 6,72 persen terhadap PDRB tahun 2008 yang sebesar Rp 2,459 triliun. Jika dilihat dari lapangan usahanya, maka penyumbangan PDRB terbesar pada tahun 2009 ini adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yakni sebesar 40 persen, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 21,9 persen, dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 9 persen.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- H₂: Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah
- H₃: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah
- H₄: Pertumbuhan tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah
- H₅: Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Ekonomi, Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang. Selama Kurang lebih 4 (empat) bulan.

Tabel Operasional Variabel

Variabel	Indikator Variabel	Skala Pengukuran
Variabel X = Pertumbuhan Penduduk	Total pengurangan jumlah penduduk tahun t dengan jumlah penduduk triwulan sebelumnya dibagi dengan jumlah penduduk triwulan sebelumnya dikali 100 %	Rasio
Pertumbuhan PDRB	Total pengurangan jumlah PDRB tahun t dengan jumlah PDRB triwulan sebelumnya dibagi dengan jumlah PDRB triwulan sebelumnya dikali 100%	
Pertumbuhan Ekonomi	Total pengurangan jumlah Ekonomi tahun t dengan jumlah Ekonomi triwulan sebelumnya dibagi dengan jumlah Ekonomi triwulan sebelumnya dikali 100%	
Tingkat Inflasi	Total jumlah Inflasi perbulan selama triwulan dibagi tiga	
Variabel Y (Penerimaan Pajak Daerah)	Realisasi penerimaan pajak daerah periode 5 tahun terakhir	Rasio

Sumber: Data Diolah (2011)

Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan *multiple regression* (Regresi Berganda). Adapun persamaan *multiple regression* untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menurut Suharyadi dan Purwanto (2004:508) adalah:

$$\text{Tax} = a + b_1 \text{Pdk} + b_2 \text{Pdrb} + b_3 \text{PE} + b_4 \text{If} + e$$

Dimana:

Tax = Penerimaan Pajak Daerah

a = Intersep

b_1, b_2, \dots, b_4 = Koefisien regresi parsial untuk Pdk = Tingkat pertumbuhan penduduk

Pdrb= Tingkat pertumbuhan PDRB

PE= Tingkat pertumbuhan Ekonomi

If = Tingkat Inflasi

e = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang beserta pertumbuhannya selama tahun 2005-2009 disajikan berikut ini.

Tabel Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang

No	Tahun	Jumlah	Pertumbuhan(%)
1.	2005	146161	3,25
2.	2006	150668	3,08
3.	2007	155250	3,04
4.	2008	156982	1,11
5.	2009	160451	2,20

Sumber BPS Kota Pangkalpinang

Berdasarkan hasil analisis terhadap jumlah penduduk selama tahun 2005-2009 pada tabel diatas, pertumbuhan penduduk kota Pangkalpinang mengalami penurunan. Laju pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2005 sedangkan laju pertumbuhan terendah ada pada tahun 2008 sebesar 1,11%.

Pertumbuhan PDRB

Jumlah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto selama tahun 2005-2009 disajikan berikut ini:

Tabel Jumlah Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang

No	Tahun	Jumlah	Pertumbuhan(%)
1.	2005	1699970	1,64
2.	2006	1905703	1,21
3.	2007	2114494	1,09
4.	2008	2459432	1,63
5.	2009	2624699	6,71

Sumber BPS Kota Pangkalpinang

Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah Pertumbuhan Ekonomi selama tahun 2005-2009 disajikan berikut ini.

Tabel Jumlah Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang

No	Tahun	Jumlah	Pertumbuhan(%)
1.	2005	16,49	2,51
2.	2006	12,10	-2,66
3.	2007	10,96	-9,42
4.	2008	16,31	4,88
5.	2009	6,72	-5,87

Sumber BPS Kota Pangkalpinang

Pertumbuhan Inflasi

Jumlah Pertumbuhan Tingkat Inflasi selama tahun 2005-2009 berikut ini:

Tabel Tingkat Inflasi Kota Pangkalpinang

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Triwulan I	1,14	1,13	0,09	6,57	-0,26
Triwulan II	0,49	-0,05	-0,25	14,69	-0,25

Triwulan III 0,85	0,72	1,04	19,16	1,04
Triwulan IV 2,99	0,3	0,19	18,4	0,19

Sumber BPS Kota Pangkalpinang

Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2005-2009 pada berikut ini.

Tabel Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

No	Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
1.	2005	120,21 %	12,44 %
2.	2006	113,94 %	14,49 %
3.	2007	119,73 %	17,43 %
4.	2008	138,13 %	32,32 %
5.	2009	127,87%	38,22%

Sumber: DPPKAD Kota Pangkalpinang

Hasil Analisis Regresi berganda

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode regresi berganda dan dihitung dengan menggunakan program SPSS 17. Berdasarkan output dari keempat variabel yaitu pertumbuhan Penduduk, PDRB, Ekonomi, dan tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah ditunjukkan berikut ini:

Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.008	1,509		-.005	.996
	pert_penduduk	2,041	2,020	.291	1,011	.329
	Pdrb	.512	.240	.553	2,133	.051
	pert_ekonomi	.045	.041	.212	1,109	.286
	ting_inflasi	1,085	.772	.220	1,406	.182

a. Dependent Variable: tax

Pengujian Hipotesis

Uji Statistik F

Tabel hasil dari Uji statistik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	423,996	4	105,999	6,910	.003 ^a
	Residual	214,771	14	15,341		
	Total	638,767	18			

a. Predictors: (Constant), ting_inflasi, pert_Ekonomi, PDRB, pert_Penduduk

b. Dependent Variable: tax

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui pula bahwa secara bersama-sama pengaruh pertumbuhan Penduduk, PDRB, Ekonomi, dan tingkat Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 6,910 dengan probabilitas 0,003. Karena sig-F kurang dari

tingkat signifikan 0,05 berarti variabel Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Ekonomi dan Tingkat Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Uji Statistik T

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, maka hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji hipotesis pertama (H_1) dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dilihat pada t-hitung = 1,011 dari tabel 4.11 diatas dengan signifikan sebesar 0,329 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan ($\alpha=0,05$).
2. Uji hipotesis kedua (H_2) menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dilihat pada t-hitung = 0,2133 dari tabel 4.11 dengan signifikansi sebesar 0,051 lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$).
3. Uji hipotesis ketiga (H_3) menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dilihat pada t-hitung = 1,109 dari tabel 4.11 dengan signifikansi sebesar 0,286 lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$).
4. Uji hipotesis ketiga (H_4) menjelaskan bahwa variabel tingkat Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dilihat pada t-hitung = 1,406 dari tabel 4.11 dengan signifikansi sebesar 0,182 lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$).
5. Uji hipotesis ketiga (H_5) menjelaskan bahwa Pengaruh pertumbuhan Penduduk, PDRB, Ekonomi, dan tingkat Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2)

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.815 ^a	.664	.568	3.91674	2.296

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pertumbuhan Penduduk mempunyai koefisien terkecil diantara koefisien regresi variabel lainnya. Pada Variabel ini pengaruh pertumbuhan Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah memiliki koefisien positif, hal ini berarti bila pertumbuhan penduduk meningkat maka penerimaan pajak daerah di Kota Pangkalpinang semakin meningkat. Pertumbuhan Penduduk dapat menjadi indikator agar masyarakat Kota Pangkalpinang memulai bertanggung jawab untuk membayar pajak.

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel pertumbuhan penduduk, mungkin hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk Kota Pangkalpinang yang belum terdata rapi pada DPPKAD Kota Pangkalpinang sehingga pajak yang terdata belum mencapai target yang optimal.

Tidak ada pengaruh dari hasil penelitian ini terhadap variabel pertumbuhan penduduk yang tidak sesuai dengan asumsi semula yaitu terdapat pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap penerimaan pajak daerah.

Pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pertumbuhan PDRB terhadap Penerimaan pajak daerah mempunyai koefisien regresi terbesar dibandingkan koefisien yang lain. Variabel ini memiliki tanda positif koefisien regresinya yang berarti apabila pertumbuhan PDRB meningkat maka penerimaan pajak daerah juga meningkat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa terlihat dari distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pangkalpinang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, dimana masyarakat Kota Pangkalpinang telah mengerti atas wajib pajak yang berlaku terhadap lapangan usaha sehingga masyarakat perlu melakukan pemotongan pajak dari hasil usaha yang telah dikelola masyarakat itu sendiri.

Pengaruh pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah memiliki koefisien positif, ini berarti bila pertumbuhan Ekonomi meningkat maka penerimaan pajak daerah juga positif atau meningkat. Pertumbuhan Ekonomi yang bergerak positif menggambarkan bahwa perekonomian sedang mengalami kemajuan atau perkembangan, sebaliknya jika hasil dari koefisien ini negatif berarti pertumbuhan ekonomi mengalami kemunduran ataupun bergerak melambat.

Tetapi variabel ini tidak signifikan sehingga hipotesisnya ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan kontribusi diantaranya terjadi pada sektor-sektor tertentu misalnya pada sektor jasa yakni dari 20,45 persen menjadi 21,92 persen, artinya masyarakat yang memiliki sektor jasa telah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak Kota Pangkalpinang yang ingin memiliki kemajuan dan peningkatan pada Kota Pangkalpinang. Kesejahteraan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah mempunyai koefisien regresi lumayan besar dibandingkan pertumbuhan Ekonomi, pada variabel ini juga memiliki hubungan yang positif, tetapi variabel ini juga tidak signifikan sehingga hipotesisnya ditolak. Sehingga Tingkat Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang menonjol terhadap penerimaan pajak daerah Kota Pangkalpinang.

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Ekonomi, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pengujian pengaruh Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Ekonomi, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak daerah secara simultan diperoleh nilai f hitung sebesar 6,910 dengan sign (p) 0,003, karena nilai sign (p) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 berarti bahwa model regresi tersebut positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dari analisis tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, PDRB, Ekonomi, dan tingkat Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Adanya tanda positif menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, PDRB, Ekonomi, dan tingkat Inflasi mengalami peningkatan maka dapat menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak daerah.

Masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penduduk

Variabel pengaruh pertumbuhan penduduk menunjukkan apabila penduduk meningkat maka Pajak Daerah juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Ini berkaitan dengan penduduk sebagai wajib pajak, walaupun dari pengolahan data yang diolah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, hal ini dikaitkan karena masih banyaknya penduduk kota Pangkalpinang yang belum memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak.

b. Ekonomi

Variabel pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatnya perekonomian di Kota Pangkalpinang maka akan meningkat pula pajak karena dengan meningkatnya perekonomian maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat akan bertambah tinggi. Dengan tingkat pendapatan yang tinggi maka masyarakat akan dapat membayar pajak lebih tinggi, tetapi hal ini juga yang menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Pangkalpinang semakin menipis sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

c. PDRB

Variabel pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah sehingga menurunnya tingkat ekonomi daerah tersebut, kesejahteraan masyarakat tidak meningkat dan tidak bisa membayar pajak dengan tertib juga memungkinkan daerah untuk menarik pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya karena daerah memerlukan dana untuk mensejahterakan masyarakat dari hasil pajak tersebut.

d. Inflasi

Variabel tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah hal ini ditunjukkan dengan tidak meningkatnya inflasi maka tidak akan meningkat pula harga barang dan jasa. Apabila pajak dikenakan dalam bentuk persen maka hal ini otomatis akan menurunkan penerimaan pajak Daerah.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian mendatang perlu menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah misalnya ditambahkan variabel pengaruh pertumbuhan usaha, kemudian dalam pajak bisa menggunakan pajak provinsi.
2. Berdasarkan hasil analisa data dan hasil uji statistik maka penulis menyarankan dalam penentuan target Pajak Daerah hendaknya memperhatikan empat variabel ini, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan Ekonomi, pertumbuhan PDRB, dan tingkat inflasi.

3. Dengan Penelitian ini Pemerintah Daerah dapat menetapkan target Pajak Daerah secara tepat dengan menggunakan keadaan daerah tersebut.
4. penentuan target yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Daerah dan menjaga agar tidak terjadi penetapan target yang terlalu tinggi sehingga berdampak negatif di masyarakat berupa timbulnya ekonomi biaya tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bird dan Vailancourt, 2000, *Desentralisasi di Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, 2005 -2009. Kota Pangkalpinang Dalam Angka
- Ghozali, Imam (2005). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS". Edisi Ketiga Semarang: BP Undip.
- Hariyhuda, Reza. (2009). Pengaruh pertumbuhan PDRB, Usaha, dan tingkat Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Tahun 2005-2007, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- <http://kamusbahasaIndonesia.org/massal.php>
- Insukindro, 1984, *Ekonomi Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta
- Kountur, Ronny. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Percetakan Buana Printing.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi offset.
- _____. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta ; Andi Offset.
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2011. *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Edisi terbaru tahun 2011, *tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2011. *Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang*. Edisi terbaru Peraturan Daerah tahun 2011, *tentang Pajak Daerah*.
- Republik Indonesia (2000) Undang-undang No 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Republik Indonesia (2004) Undang -undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia (2011) Undang-undang No 1 Tahun 2011 Tentang Peraturan Daerah.
- Suning, Dept. of Economic and Development Studies, 2003, *Analisis Pajak Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk Terhadap Upaya Pajak* di Propinsi Jawa Timur.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suryadi dan Purwanto. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern* Jakarta: Salemba Empat. Percetakan Buana Printing.
- Sadono Sukirno, 2004, *Makroekonomi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Yusi, Syahrman dan Umiyati Idris. 2009. *Statistika Untuk Ekonomi dan Penelitian*. Palembang: Citra Books Indonesia